

**DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN TILANG
ELEKTRONIK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

EVA LESNA NAINGGOLAN

191010040

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2023

DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN TILANG

ELEKTRONIK DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana



Oleh:

EVA LESNA NAINGGOLAN

191010040

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Eva Lesna Nainggolan

NPM : 191010040

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BATAM”

.Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar sarjana yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



Eva Lesna Nainggolan

191010040

**DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN TILANG
ELEKTRONIK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

Eva Lesna Nainggolan

191010040

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Juli 2023



Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.

Pembimbing



ABSTRAK

Kebijakan ETLE di Kota Batam masih menghadapi banyak pelanggaran, dan hanya 9% dari para pelanggar yang melakukan pembayaran denda. Dalam pelaksanaan kebijakan ETLE di Kota Batam, setelah tiga puluh hari masa uji coba pelaksanaan Tilang Elektronik, tercatat 5.782 pelanggar. Namun, baru 550 orang yang telah membayar denda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dampak Penerapan Kebijakan Tilang Elektronik di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam proses pengumpulan informasi, dilakukan wawancara dengan petugas back office, front office, serta masyarakat. Dokumentasi yang dikumpulkan mencakup pelatihan, sosialisasi melalui Instagram, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan, yaitu: 1) Sosialisasi kebijakan ETLE disampaikan melalui penyuluhan dan media sosial Instagram, 2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ETLE telah memadai. Namun, dari sisi sarana dan prasarana masih perlu ditambahkan kamera statis pengawas, 3) Pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan ETLE, dan 4) Dalam pelaksanaan tugas, kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah memiliki SOP yang terstruktur dengan baik.

Kata kunci: Kebijakan, ETLE dan Pelanggar

ABSTRACT

The ETLE policy in Batam City still faces many violations, and only 9% of the violators pay fines. In implementing the ETLE policy in Batam City, after a thirty day trial period for implementing Electronic Tickets, 5,782 violators were recorded. However, only 550 people have paid the fine. The purpose of this study is to describe and analyze the Impact of Implementing Electronic Ticketing Policies in Batam City. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. In the process of gathering information, interviews were conducted with back office, front office, and the community. Documentation collected includes training, outreach via Instagram, and SOP (Standard Operating Procedure) for the Riau Islands Regional Police. The results of the study show several conclusions, namely: 1) Socialization of the ETLE policy is delivered through counseling and social media Instagram, 2) The human resources involved in implementing the ETLE policy are sufficient. However, in terms of facilities and infrastructure, static surveillance cameras still need to be added, 3) Policy implementers have a high commitment in carrying out ETLE policies, and 4) In carrying out their duties, the Riau Islands Regional Police have a well-structured SOP.

Keywords: *Policy, ETLE and Offenders.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang murah hati, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dengan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir laporan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dalam program studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan ide yang konstruktif. Penulis juga mengakui bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan rendah hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam Ibu Lubna Salsabilah, S.IP., M.IP., M.PA.
4. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. selaku Pembimbing Skripsi Penulis Pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam yang sudah banyak membantu saya.
5. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis Di Universitas Putera Batam.

6. Bapak Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. Ibu Lubna Salsabilah, S.IP., M.IP., M.PA. Ibu Etika Khairina, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis;
7. Segenap Dosen dan Staf Universitas Putera Batam;
8. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermamfaat bagi penulis.
9. Kepada narasumber Bapak Perwira Kartijo, Muhammad Verry Zakky, Anry Dedi Samosir, Roselina, Henra dan Putra.
10. Kedua orang tua Bapak Burhan Nainggolan dan Ibu Warnita Nababan, adik-adik Rolly Krisdayanti, Krismon Aswantri, Ari Rikardo, Devi Yanti, Justina Yelita, Buwana Triboy, Natasya Hantana, Nurida Puan Sintauli, Arga Syaputra, Elevent Nainggolan. Beserta keluarga besar yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta mendoakan agar tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
11. Keluarga di Batam Maktua Op Kristian Nababan, Lasmaria Pandiangan, Wulandari, Irma Simanungkalit, Lasma Nainggolan, Roselina Nainggolan, Novita Nainggolan, Bou Mario Nainggolan, Susianti Pandiangan dan seluruh keluarga besar Naposo Parsadaan Toga Nainggolan Se-Barelang yang memberikan dukungan secara moril dan materi.

12. Teman-teman Program studi Administrasi Negara angkatan 2019 terkhusus Betty Krisdayanti Sihombing, Agustina Sombo, Hafizah Nurul Khatresna, Meysi Ansari Ginting, Melati Kharolika dan seluruh teman-teman seperjuangan.
13. Serta semua pihak yang memberikan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan Hidayah dan Karunia-Nya, Amin.

Batam, 28 Juli 2023



Eva Lesna Nainggolan

191010040



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori	7
2.1.1 Kebijakan Publik.....	7
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan	15
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Sifat Penelitian.....	30
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian	31
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	31
3.3.2. Periode Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data	32

3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Metode Analisis Data	35
3.7	Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1.	Gambaran Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau	39
4.1.2.	Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Kebijakan ETLE Polda Kepri....	44
4.1.3.	Dampak Penerapan Kebijakan E-Tilang di Kota Batam	45
4.2	Pembahasan	72
4.2.1	Dampak Penerapan kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) di Kota Batam.....	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		77
5.1	Simpulan.....	77
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pelanggaran ETLE di Kota Batam Tahun 2022.....	4
Gambar 2.1	Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	17
Gambar 2.2	Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi	21
Gambar 2.3	Kerangka Pemikir	29
Gambar 3. 1	Komponen dalam Analisis Data (<i>interactive model</i>).....	37
Gambar 4.1	Mekanisme Sistem Kerja ETLE	44
Gambar 4.2	Sosialisasi Terkait <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	47
Gambar 4.3	Sosialisasi Penindakan Pelanggaran Terhadap WNA ETLE Statis di Instagram rtmc.poldakepri	48
Gambar 4.4	Penyuluhan ETLE kepada karyawan PT. ALCO.....	49
Gambar 4.5	Sosialisasi Terkait ETLE Mobile Handled di Instagram rtmc.poldakepri	50
Gambar 4.6	Pelatihan kebijakan pertama <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	54
Gambar 4.7	Pelatihan kebijakan kedua <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	54
Gambar 4.8	Ruang Komputer Back Office.....	58
Gambar 4.9	Panel Led monitoring back office	58
Gambar 4.10	Meja Back Office	59
Gambar 4.11	Loket Pembayaran Front Office.....	59
Gambar 4.12	Pembayaran Ke Bank BRI	60
Gambar 4.13	Charger HP di ruang tunggu Front Office	61
Gambar 4.14	Kamera Statis di simpang alun-alun Batam Center	62
Gambar 4.15	Kamera Statis Panbil menuju Kepri Mall	62
Gambar 4.16	Kamera Statis disimpang KDA Batam centre.....	63
Gambar 4.17	Surat Konfirmasi Pelanggar	66
Gambar 4.18	SOP (<i>Standar Operasional Prosedur</i>) ETLE	69
Gambar 4.19	SOP (<i>Standar Operasional Prosedur</i>) ETLE	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Periode Penelitian	31
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai/Petugas ETLE Tahun 2023	45
Tabel 4.2 Fasilitas Pendukung Kebijakan ETLE	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik pada hakekatnya adalah suatu otoritas yang diciptakan oleh sekelompok individu dengan kekuasaan yang sah di dalam suatu sistem politik. Keputusan akhir yang diformalkan mengikat secara hukum atas semua tindakan di masa depan yang diambil oleh pekerja sipil atau anggota masyarakat. Salah satu komponen penting dalam menciptakan pemerintahan yang unggul adalah kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Wahab, 2021:14) adalah mengacu pada keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Hal ini tergantung pada kebijakan pemerintah yang diterapkan dan bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap tujuan kebijakan.

Dalam pengimplementasian kebijakan publik dapat diterapkan pelayanan publik untuk menerapkan kebijakan tersebut. Landasan pelayanan publik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang dasar pelayanan publik di Indonesia. Organisasi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, bertugas memberikan pelayanan publik. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menegakkan ketertiban. Berbagai jenis kegiatan pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, badan usaha, barang dan jasa, serta kekayaan negara atau daerah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menyediakan pelayanan publik. Peraturan dan pedoman harus menjadi acuan dan dipatuhi oleh penyelenggara pemerintahan sehingga menjadi standar pelaksanaan.

Pelayanan publik juga dapat disediakan oleh entitas non-pemerintah seperti sektor komersial atau masyarakat selain pemerintah.

Peningkatan standar pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan merupakan salah satu langkah menuju pembenahan sistem pelayanan publik. Polisi adalah salah satu penyedia layanan dalam situasi ini. Pelayanan pemerintah dewasa ini sangat dipengaruhi oleh perubahan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelayanan berbasis elektronik. Dalam hal penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas biasanya meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah dan kepolisian telah memulai kebijakan pemutakhiran sistem denda melalui pemberlakuan tilang elektronik atau yang disebut E-Tilang, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi dan meniadakan pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Sistem tilang manual yang sebelumnya menggunakan surat tilang atau blanko kini diganti dengan sistem E-tilang. Salah satu inisiatif pemerintah untuk menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas adalah E-Tilang. Dengan diterapkannya kebijakan E-Tilang ini, maka pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang akan membantu tercapainya tata pemerintahan yang baik.

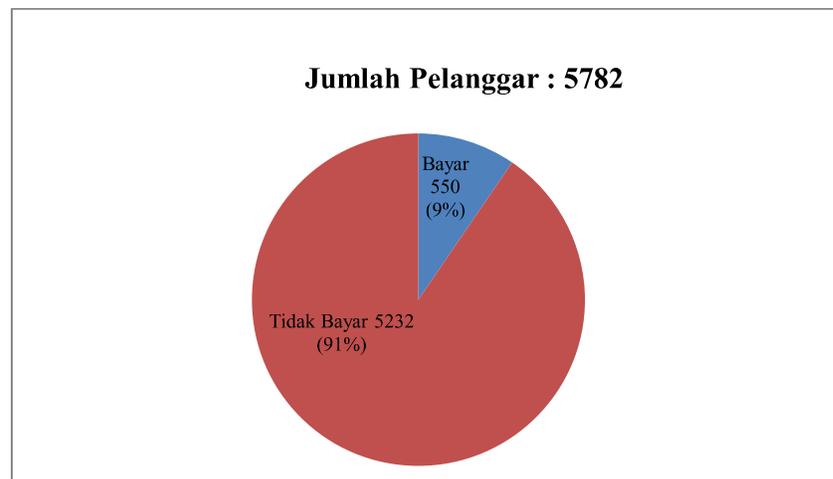
Kebijakan E-Tilang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan sistem tilang elektronik ini didasarkan pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan tilang di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan. Kebijakan E-tilang menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendigitalkan prosedur tilang. Dengan diterapkannya kebijakan ini, diyakini prosedur tilang akan lebih lancar.

Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE adalah Istilah Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik mengacu pada sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan alat elektronik seperti kamera dan teknologi informasi. Pada tanggal 25 November 2018, Ditlantas Polda Metro Jaya memperkenalkan E-Tilang Resmi. Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam telah menjalankan kegiatan E-tilang ini sejak penulis, 22 September 2022 di tiga titik yaitu simpang Masjid Raya Batam Center dari simpang Frengki menuju Bundaran BP Batam, titik ETLE simpang Panbil dari arah Batu Aji menuju Kepri Mall, dan simpang KDA dari luar RS Elizabeth. Telah dilakukan masa uji coba selama 30 hari dari masa diberlakukan E-Tilang di kota Batam. Dikutip dari Tribun Batam (2023) Kaposko *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri mengungkapkan ada 4.148 pelanggaran yang terdokumentasi selama masa uji coba E-Tilang selama 30 hari setelah diberlakukan di Kota Batam. Kamera CCTV biasanya menangkap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor roda dua, seperti tidak memakai helm atau mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan tidak memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat (BatamNews, 2022).

Dikutip dari Regional Kompas (2022) setelah 30 hari pemberlakuan masa uji coba pelaksanaan E-tilang, terdapat 5.782 pelanggar yang tercatat dalam

Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Batam. Dari total yang tercatat diatas baru 550 orang yang membayar denda. Terlihat dari pembayaran denda untuk pelanggar ETLE yang masih minim. Pembayaran denda yang belum memenuhi standard efisiensi dari kebijakan E-Tilang tersebut. Ketersediaan E-tilang diharapkan akan memudahkan pelanggar untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua orang dapat mematuhi instruksi E-tilang dari kepolisian. Diketahui juga masih terdapat kendala yang dihadapi oleh kepolisian soal konfirmasi tilang saat kendaraan tertangkap kamera ETLE melanggar, dilanjutkan ke konfirmasi dan ternyata kendaraan sudah berpindah tangan sehingga surat tilang tidak sampai kepada yang bersangkutan (Maulana, 2022).



(Sumber: Regional Kompas Batam, 2022)

Gambar 1.1 Pelanggaran ETLE di Kota Batam Tahun 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Fikri (2022) dengan judul “Dampak Layanan Informasi Melalui Aplikasi untuk Asisten Pelayanan Informasi cepat Kecamatan kelas II di Pengadilan Kabupaten Tanah Grogot, kabupaten Paser” menjelaskan hasil dari penelitian tersebut berdampak positif, dengan adanya aplikasi ALICE memudahkan masyarakat karena tersedianya informasi sehingga mendorong partisipasi masyarakat lebih aktif, tidak terjadinya korupsi administrasi dan praktek pencaloan dikarenakan tidak adanya pertemuan antara masyarakat dan aparat.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait kebijakan tilang Elektronik yang ada di Kota Batam dan temuan permasalahan dilapangan. Maka, peneliti tertarik mengangkat judul “**Dampak Penerapan Kebijakan Tilang Elektronik di Kota Batam**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah dampak penerapan kebijakan tilang elektronik di Kota Batam?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis “Dampak penerapan kebijakan tilang elektronik di kota Batam”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat/kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik khususnya dalam bidang ilmu kebijakan publik dan pelayanan publik.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan dan motivasi pada pihak-pihak yang berkepentingan:

- 1) Polda Kepri dalam melaksanakan kebijakan E-Tilang di Kota Batam.
- 2) Masyarakat dalam pemahaman tentang penerapan kebijakan E-Tilang di Kota Batam.
- 3) Peneliti selanjutnya, yaitu menjadi sumber referensi penelitian dengan lingkup yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu hasil atau efek dari teknik penyelenggaraan pemerintahan yang juga meliputi barang, jasa, dan regulasi publik. Akibatnya, sifat dan pelaksanaan kebijakan publik selalu dikaitkan dengan berbagai segi keberadaan pemerintahan, terutama bentuk negara, sistem presidensial, dan struktur organisasi pemerintahan. Bentuk negara mempengaruhi substansi dan prosedur pemberitaan publik, khususnya karena peran negara sebagai kendaraan bagi jalannya kebijakan publik. Bangsa adalah organisasi yang menciptakan kerangka otoritas yang berfungsi sebagai saluran untuk dokumen dan sistem pemerintahan serta prosedur kebijakan. Kedua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang dinamis untuk implementasi kebijakan publik (Muchlis, 2018).

Bila dilihat dari segi instrumental, kebijakan publik merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengakui nilai-nilai publik (*public value*). Melalui berbagai prosedur birokrasi, nilai-nilai publik tersebut dapat dicapai. Kebijakan publik pada umumnya berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Mengatasi masalah melalui keterlibatan masyarakat, seperti

mengurangi kemiskinan, pengangguran, kekerasan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan ide panduan yang digunakan untuk menguraikan bagaimana suatu pekerjaan akan dilakukan, dikelola, dan bagaimana itu akan dilakukan. Frasa ini dapat digunakan untuk menggambarkan organisasi di sektor pemerintah, swasta, dan nirlaba serta individu. Kebijakan tidak sama dengan persyaratan hukum. Undang-undang yang mengamanatkan pembayaran denda tilang elektronik merupakan salah satu contoh peraturan yang dapat membatasi atau mengatur perilaku. Kebijakan di sisi lain, hanya mengarahkan kegiatan yang paling mungkin menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Istilah "evaluasi kebijakan" dan "peninjauan kebijakan" juga dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan organisasi yang penting yang melibatkan identifikasi berbagai pilihan, seperti aplikasi atau prioritas pengeluaran, dan pertimbangan utama dampak dalam proses pemilihan. Ruang lingkup kebijakan secara alternatif dapat dilihat sebagai manajemen, politik atau ekonomi. Kebijakan dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Memahami perlunya kebijakan didasarkan pada sejumlah faktor. Menurut Abidin (Handoyo, 2012) ada empat komponen utama kebijakan yaitu tujuan kebijakan, masalah yang dihadapi, tuntutan atau permintaan (*demand*), dan dampak atau hasil yang diantisipasi (*outcomes*).

Thomas Dye (Kadji, 2018:08) "*public policy is whatever government choose to or not to do*" (Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Tindakan pemerintah, baik yang diambil maupun

tidak, disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memahami: (a) apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah; (b) alasan kebijakan tersebut dan bagaimana hal itu akan berdampak masyarakat; dan (c) bagaimana kebijakan publik akan berdampak orang apakah itu dilaksanakan atau tidak.

Pendapat lain yang diungkapkan Friedrich (Wahab, 2021:19) Melihat kebijakan sebagai gerakan yang didukung mengenai individu, perusahaan atau otoritas dalam lingkungan tertentu yang terdiri dari hambatan dan kemungkinan yang ditaklukkan atau dimanfaatkan melalui peraturan yang disarankan yang akan mencapai suatu maksud.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aturan atau program yang tepat dibuat oleh pemerintah untuk meraih mimpi yang diinginkan dan pola gerak yang diputuskan melalui pemerintah dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kebijakan publik, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai cara merupakan komponen penting dari sebuah pemerintahan. Pemerintah mampu dan berdaya untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan. Proses pengaturan ini dibantu oleh penerapan hukum pada masyarakat. "Masyarakat manusia" yang memiliki hak hukum untuk menggunakan kekuatan fisik di wilayah tertentu adalah negara. Menurut Max Weber (Muchlis, 2014:02), masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terkait dengan peraturan pemerintah. Pemerintah yang

merupakan negara yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warganya harus memperhatikan dan melakukan kontrol atas persoalan tersebut karena bentuknya yang bermacam-macam. Dengan menegakkan kebijakan publik, kehadiran negara, seperti yang ditunjukkan oleh bentuk pemerintahannya, mengendalikan rakyatnya.

Kemampuan mengambil keputusan dan kemudian bertindak atas keputusan tersebut dimiliki oleh pembuat kebijakan. Hasil dari tindakan ini dapat berupa persetujuan, modifikasi, atau bahkan penghapusan. Pilihan pemerintah dipandang memiliki kewenangan yang mengikat bagi semua pihak karena kebijakan yang telah ditetapkan memiliki landasan hukum yang berlaku. Ada lima langkah dalam proses pengembangan kebijakan publik, menurut (Wibawa et al., 2018:22) sebagai berikut:

1) Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah

Mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi masyarakat kontemporer (*public issues*) merupakan langkah awal dalam proses implementasi kebijakan. Intinya, kebijakan dibuat untuk menangani masalah sosial tertentu. Saat menilai kebijakan publik, menarik untuk mempertimbangkan seberapa banyak mereka dapat membantu menyelesaikan masalah sosial ini.

2) Langkah kedua adalah agenda kebijakan

Pendekatan pemecahan masalah yang optimal kemudian ditentukan untuk masing-masing masalah ini. Ada banyak solusi atau opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai arah tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki

masalah selama tahap perumusan kebijakan, mirip dengan proses memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Salah satu alternatif gagasan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan pada akhirnya dipilih untuk diimplementasikan sebagai tahapan selanjutnya dalam kebijakan publik. Keputusan tersebut didukung oleh mayoritas legislatif, persetujuan direktur agensi, atau keputusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Hanya jika mereka tidak dipraktikkan, program kebijakan akan berubah menjadi preseden yang terkenal. Penentuan tentang program-program kebijakan yang dipilih sebagai alternatif permasalahan harus segera dilakukan, khususnya oleh instansi pemerintah di tingkat bawah. Instansi pemerintah harus memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk mengimplementasikan kebijakan. Berbagai kepentingan akan bersaing pada tingkat implementasi ini. Pelaksana dapat mendukung beberapa kebijakan atau menolak yang lain tergantung pada kebijakan yang diterapkan.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada titik ini, akan ditentukan apakah kebijakan yang diadopsi perlu diperiksa atau dianalisis untuk menentukan seberapa baik mereka telah mengatasi masalah saat ini. Pada dasarnya, tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mendapatkan efek yang diinginkan, yang dalam hal ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi. Akibatnya, metrik atau standar dibangun

sebagai dasar untuk menentukan apakah inisiatif publik memiliki efek yang diinginkan.

Sebagaimana dapat disimpulkan dari uraian langkah-langkah pembuatan kebijakan publik di atas, tidaklah mudah untuk melakukannya. Masyarakat dirundung berbagai masalah, oleh karena itu setiap masalah harus ditangani secara efektif dan sesuai dengan keadaan lingkungan setempat. Agar tidak merugikan masyarakat, pembuat kebijakan harus melakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum implementasi mengacu pada tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah direncanakan dengan cermat sehingga dapat diwujudkan dengan aktualitas dan kejelasan. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan adalah implementasi kebijakan. Berdasarkan George C Edward III model implementasi meliputi: komunikasi, sumberdaya, Deposisi atau pola pikir dan Bentuk birokrasi (Tahir, 2023).

Implementasi diartikan sebagai “kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan dalam suatu keputusan” oleh (Akib, 2010) Langkah ini berusaha menerapkan keputusan untuk membawa perubahan yang diinginkan, apakah itu signifikan atau kecil. Implementasi pada hakekatnya adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program

dilaksanakan. Implementasi adalah proses mengubah keputusan fundamental menjadi tindakan spesifik.

Wahab (Tahir, 2023) lebih lanjut mendefinisikan implementasi sebagai tindakan memberlakukan pertimbangan dasar kebijakan, yang dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, perintah, atau penilaian lainnya. Keputusan eksekutif atau yudikatif yang penting seringkali mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan dan secara tegas menyatakan tujuan yang harus dicapai. Eksekusi kebijakan publik dapat dipandang sebagai topik kajian dalam ilmu administrasi publik menurut Tachjan (Tahir, 2023). Selain itu, implementasi dapat dilihat sebagai salah satu tugas birokrasi (kelembagaan) administrasi publik yang berlangsung selama perumusan kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2023), ada tiga cara untuk melihat implementasi kebijakan: dari sudut pandang pembuat keputusan, otoritas pelaksana lapangan, dan aktor tertentu yang menjadi populasi sasaran. Menurut kamus Webster, implementasi digambarkan sebagai pemberian cara kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dan memberikan pengaruh terhadap sesuatu (Wahab, 2021). Dalam bentuknya yang paling mendasar, implementasi adalah upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh program dalam menjalankan kebijakan. Implementasi menurut Danil A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 2021) adalah pemahaman tentang suatu program setelah diartikulasikan atau ditetapkan. Fokus perhatian pemerintah pada implementasi kebijakan mencakup peristiwa dan tindakan yang mengikuti adopsi rekomendasi kebijakan publik,

yang melibatkan upaya untuk mengontrol dan memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sugiono, 2014), implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan keputusan kebijakan mendasar menjadi tindakan. Ini biasanya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat dicapai dengan arahan eksekutif atau putusan yudisial yang signifikan. Pilihan ini menguraikan masalah yang akan dipecahkan, maksud atau tujuan yang akan dicapai, dan berbagai metode yang digunakan untuk menentukan atau mengendalikan bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Salah satu fase terpenting dari siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Mengikuti pengenalan undang-undang dan peraturan yang mengesahkan program, kebijakan, atau hasil tertentu, sejumlah tindakan diambil yang dikenal sebagai implementasi. Menurut Syafie, (2011), implementasi ini memerlukan keterlibatan instansi pemerintah dan berkaitan dengan pencapaian tujuan dan hasil program. Implementasi ini juga mengacu pada penerapan hukum yang mengatur kebijakan, prosedur, atau hasil (*outcome*) yang transparan dan nyata (fisik).

Uraian ini mengarah pada kesimpulan umum bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai kepentingan. Hasil jangka panjang dari implementasi kebijakan diharapkan sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang berfokus pada masyarakat.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Model kebijakan publik adalah penggambaran atau gambaran fiktif dari proses politik. Model-model ini berusaha mengklarifikasi, mendekonstruksi, dan menawarkan pemahaman tentang isu-isu yang dipandang krusial dalam politik dan urusan publik. Kriteria dan metode yang digunakan untuk menjelaskan kehidupan politik dan kebijakan publik menentukan seberapa penting sebuah model dalam melakukannya. Saat ini, berbagai disiplin akademis memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan diimplementasikan. Ada banyak model yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sebagai pedoman. Variabel aparatur dan masyarakat yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan juga akan berdampak terhadapnya.

A. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn.

Model *top-down* Van Metter dan Van Horn untuk strategi implementasi kebijakan adalah model *top-down*. Proses implementasi kebijakan ini merupakan hasil dari implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja implementasi publik yang sesuai dengan harapan yang terkait dengan banyak faktor. Model ini menunjukkan bagaimana kebijakan diimplementasikan secara linier, dimulai dari keputusan politik yang dapat dibuat, melalui implementasi kebijakan hingga mencapai kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Metter & Van Horn (Muchlis, 2014) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan masuk akal mengingat lingkungan sosiokultural pada tingkat implementasi kebijakan, kinerjanya dapat dievaluasi dalam hal seberapa berhasil kebijakan tersebut. Akan sulit untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan publik ke titik di mana mereka dapat dianggap efektif jika skala atau tujuan kebijakan terlalu idealis (atau terlalu utopis) untuk diterapkan oleh masyarakat.

2) Sumber-Sumber Kebijakan

Ketersediaan sumber daya juga harus dipertimbangkan selama proses implementasi kebijakan, bersama dengan ukuran dan tujuan kebijakan. Sumber daya ini sangat penting dalam menentukan seberapa baik kebijakan publik dijalankan. Pendanaan dan bentuk bantuan lain yang dapat mendorong dan membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah secara efisien termasuk dalam sumber daya yang dimaksud. efektif.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Entitas resmi dan informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik termasuk dalam fokus lembaga pelaksana. Hal ini penting karena sifat dan kesesuaian yang tepat dari agen pelaksana memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan publik.

4) Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Tingkat keberhasilan eksekusi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini disebabkan kemungkinan kebijakan yang diambil tidak berasal dari

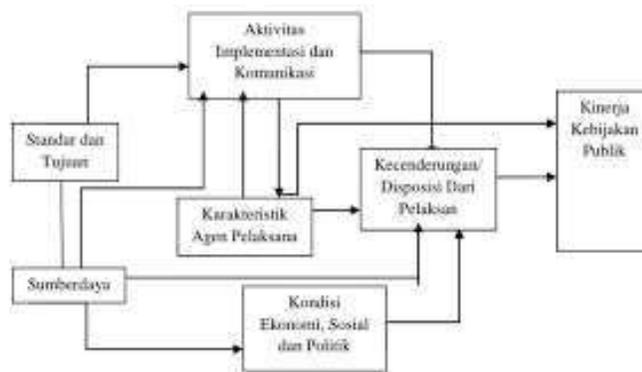
masyarakat lokal yang benar-benar memahami persoalan dan tantangan yang mereka hadapi.

5) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan

Jika penanggung jawab pelaksana kebijakan memahami langkah-langkah dan tujuan kebijakan, implementasi akan berjalan dengan lancar. Untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sangat penting bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi dengan baik.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauh mana lingkungan mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan dan harus diperhitungkan saat mengevaluasi hasil implementasinya. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terlibat dalam hal ini.



Gambar 2.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

B. Teori Sabatier

Menurut Sabatier, kebijakan harus ditinjau dalam siklus yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Banyak variabel yang memengaruhi kebijakan, yang sebagian besar mudah ditentukan saat menggunakan pendekatan *top-down*. Diantaranya termasuk lingkungan sosial ekonomi, sistem peradilan, dan susunan fundamental pemerintahan.

C. Teori Matland

Literatur implementasi kebijakan menyatakan bahwa berbagai jenis kebijakan diselidiki menggunakan teknik *top-down* dan *bottom-up*. Mereka yang menyukai kebijakan yang menjelaskan diri sendiri menyukai pendekatan *top-down*, sedangkan mereka yang menyukai kebijakan yang lebih ambigu menyukai pendekatan dari bawah ke atas. Model ambiguitas/konflik diusulkan oleh Matland sebagai rencana cadangan.

D. Teori George C. Edward III

Salah satu langkah penting dalam pembuatan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Sebaik apapun tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan dan direncanakan, akan sia-sia jika tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu langkah implementasi sangatlah penting. Faktor penentu utama dalam proses penetapan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Elemen ini sangat penting karena, sebaik apa pun suatu kebijakan, akan gagal jika tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Oleh karena itu, tidak mungkin menerapkan kebijakan publik sebelum alokasi anggaran yang

sesuai dibuat untuk mendukung pembiayaan pelaksanaannya, serta sebelum undang-undang atau peraturan dibuat.

Paradigma George C. Edward dalam mengimplementasikan kebijakan mengikuti metodologi *top-down*. George C. Edward mengklaim bahwa ada empat faktor yang secara signifikan mempengaruhi seberapa baik kebijakan pemerintah diimplementasikan. Keempat faktor tersebut adalah struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi. Penulis dapat mengidentifikasi hambatan potensial untuk pelaksanaan keberhasilan kebijakan dengan mengenali empat elemen ini (Leo, 2018) sebagai berikut:

1) Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi sangat penting dalam menentukan seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan. Ketika pembuat keputusan sepenuhnya menyadari langkah-langkah yang harus diikuti, implementasi menjadi efektif. Selain itu, menunjukkan bahwa komunikasi berhasil jika pelaksana kebijakan memahami apa yang perlu dilakukan dan telah melakukan langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, setiap pilihan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus dikomunikasikan secara efektif kepada individu yang bersangkutan. Kebijakan yang harus dinyatakan juga harus tepat, akurat, dan konsisten.

2) Sumber Daya

Edward III mengklaim bahwa sumber daya adalah faktor selanjutnya yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Jika orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tidak memiliki

alat yang tepat, bahkan ketika instruksi telah disampaikan dengan tepat, cepat, dan konsisten, implementasinya kemungkinan besar akan gagal. Oleh karena itu sumber daya merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang disebutkan termasuk sumber daya keuangan dan personel dengan bakat dan keterampilan yang relevan dalam disiplin terkait.

Pemerintah sering kesulitan menemukan pegawai dengan kemampuan manajerial yang diperlukan. Profesional yang dipromosikan ke posisi administratif terkadang kehilangan kemampuan untuk menggunakan keahlian profesionalnya. Keterbatasan dalam kemampuan manajemen merupakan masalah signifikan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dan nasional. Ini karena tidak ada sumber daya yang cukup untuk pelatihan profesional.

3) Disposisi

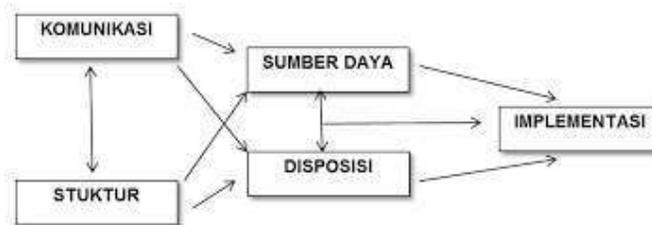
Selanjutnya, Edward III mengklaim bahwa disposisi merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Cara pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kepribadian atau sikap dari mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya sesuai dengan bidangnya agar implementasi kebijakan dapat efektif. Alhasil, proses implementasi kebijakan bisa berjalan tanpa hambatan.

4) Struktur Birokrasi

Salah satu kelompok atau lembaga yang sering melakukan implementasi kebijakan adalah birokrasi. Efektivitas pelaksana kebijakan terhalang oleh struktur organisasi mereka yang tidak efektif bahkan ketika sumber daya

tersedia, mereka memahami tugasnya, dan mereka ingin memenuhinya. Proses implementasi kebijakan dapat terhambat oleh struktur organisasi yang membatasi aktivitas yang dapat dilakukan sehubungan dengan kebijakan tersebut, meskipun pelaksana sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memiliki motivasi dan sumber daya untuk melakukannya.

Setelah memperhatikan penjelasan di atas, maka peneliti akan memaparkan gambaran keempat variabel pendukung implementasi kebijakan menurut Edward III pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Meskipun tahap implementasi memberikan hasil, program atau kebijakan mungkin tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam beberapa keadaan, kedua bagian tersebut sebenarnya bisa gagal. Hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab, menurut Anderson (Muchlis, 2014), antara lain.:

- 1) Keterbatasan sumber daya

- 2) Kurangnya ketepatan dalam implementasi
- 3) Kebijakan yang hanya mengatasi satu faktor dari berbagai masalah publik yang kompleks
- 4) Respons yang tidak memaksimalkan dampak yang diinginkan dari kebijakan
- 5) Tujuan kebijakan yang tidak sejalan
- 6) Biaya implementasi yang melebihi manfaat yang diperoleh dari penyelesaian masalah
- 7) Tidak dapat menyelesaikan banyak masalah umum
- 8) Munculnya masalah baru yang menyebabkan perubahan tindakan
- 9) Pemecahan masalah yang tidak tepat atau tidak efektif

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Bambang Irawan Dan Ahmad Fikri (2016) (Irawan & Fikri, 2022)	Dampak Layanan Informasi Melalui Aplikasi Untuk Asisten Pelayanan Informasi Cepat Kecamatan Kelas Ii Di Pengadilan Kabupaten	Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut berdampak positif, dengan adanya aplikasi ALICE memudahkan masyarakat karena tersedianya informasi sehingga mendorong

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Tanah Grogot, Kabupaten Paser		partisipasi masyarakat lebih aktif, tidak terjadinya korupsi administrasi dan praktek pencaloan dikarenakan tidak adanya pertemuan antara masyarakat dan aparat.
2	Rizaldy Tumbel Burhanuddin Kiyai Rully Mambo (2021)(RIZALDY TUMBELBURHANUDDIN KIYAIRULLY MAMBO, 2021)	Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Temuan studi menunjukkan bahwa kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kondisi ekonomi masyarakat miskin hanya memberikan sedikit dukungan terhadap tingkat pendapatan mereka selama pandemi. Namun, ada beberapa masalah dengan bagaimana program ini dilaksanakan. Salah satunya adalah ketidakakuratan data yang mengakibatkan program tidak mengikutsertakan semua penduduk miskin. Selain

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				itu, ada keterlambatan dalam prosedur pembayaran dan beberapa permintaan penerima bantuan tidak diperhitungkan saat mengelola bantuan. Hasilnya, program bantuan keuangan langsung pemerintah belum sepenuhnya memiliki efek yang diharapkan.
3	Risma Septari Amiri Salmin Dengo Very Y. Londa (2019)(Amiri et al., 2017)	Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara	Kualitatif	Populasi Pulau Nain belum terpengaruh secara signifikan oleh temuan penelitian. Hal ini terutama karena penekanan program bantuan masih semata-mata pada hubungan interpersonal dan karena komunikasi yang kurang antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, masyarakat kurang antusias membantu dunia

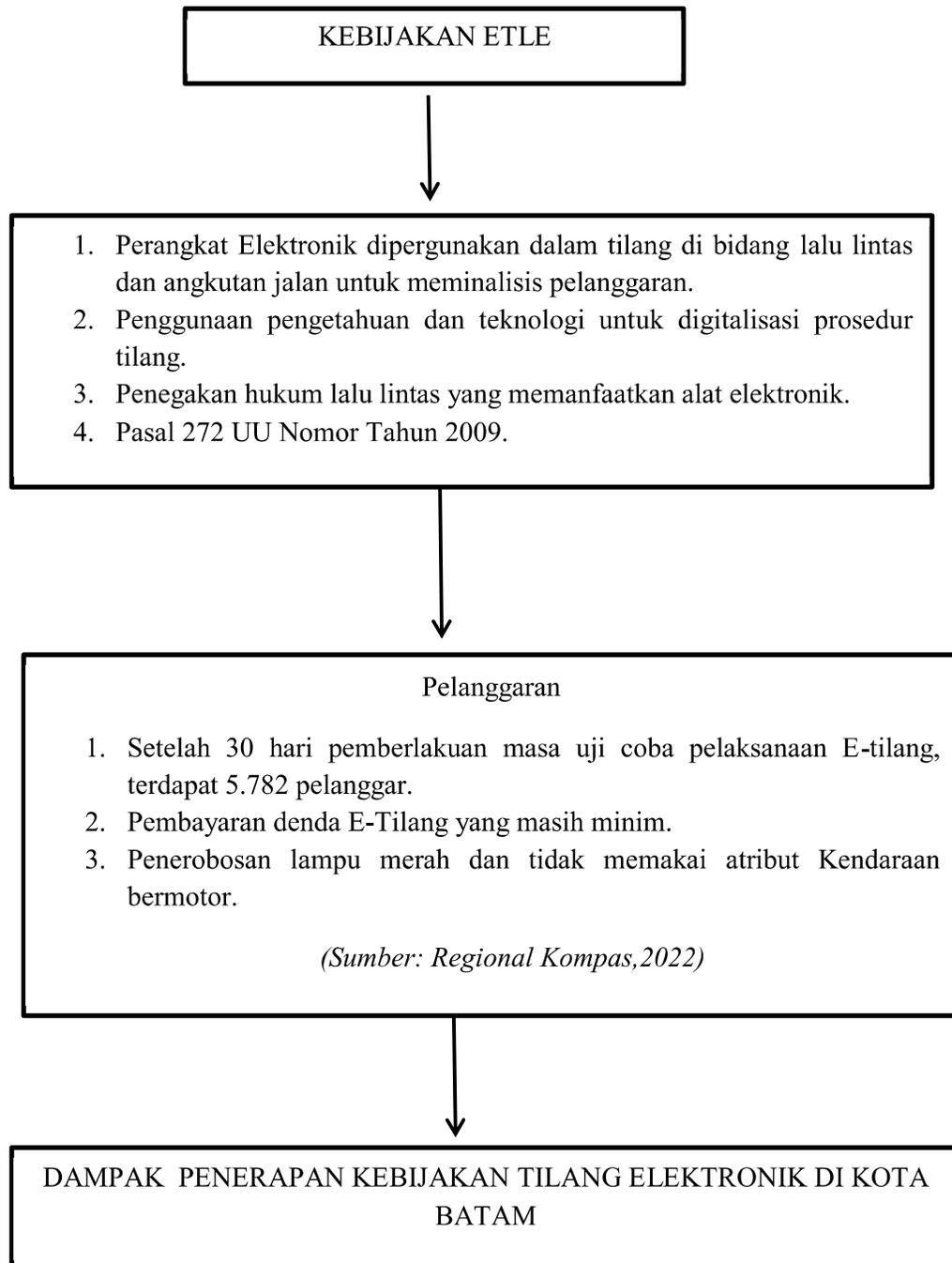
No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				usaha karena minimnya keterampilan, dan pemerintah kurang aktif memantau pelaksanaan program tersebut.
4	Marsekaldo Rivaldo Manzanaris Joyce J Rares Burhanuddin Kiyai (2019)(Manzanaris et al., 2018)	Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara	Kualitatif	Hasil penelitian bahwa dalam lingkup pasar, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD) sehingga hal-hal terkait pasar teknis Rencana kerja Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, aturan administrasi teknis, praktik retribusi, dan program tindak lanjut semuanya termasuk dalam pasar teknis. Ini membahas masalah permintaan, kebersihan, keamanan, manajemen, kontrol, dan administrasi yang terkait dengan pasar.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
5	Jevanly Onibala .J.H.Posumah Very Londa (2022)(ONIBALA et al., 2021)	Dampak Kebijakan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pt. Geothermal Bagi Masyarakat Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Hasil penelitian ber dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah Melalui pemberdayaan CSR-CSR PGE, masyarakat mengalami peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan masyarakat Selain itu, dari segi ekonomi, terdapat kesempatan kerja di PGE yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan memungkinkan pendapatan yang diperoleh digunakan sebagai modal usaha serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan dampak negatifnya ialah kebisingan dari kegiatan eksplorasi PGE memiliki efek

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				yang merugikan..
6	Benyamin Banga Padang Masje S. Pangkey Alden Laloma (2022)(Tumurang et al., 2018)	Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Megamas Bagi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Wenang Kelurahan Wenang Selatan Kota Manado	Kualitatif	Hasil penelitian adalah Karena banyak masyarakat lokal, khususnya masyarakat nelayan yang kondisi ekonomi nelayannya sedang terpuruk, terus menanggung dampak reklamasi pantai di kawasan Megamas terus melanggar aturan yang ada. Meskipun demikian, strategi pemulihan memang dapat menggerakkan perekonomian kota Manado dengan menjadikan kawasan pemulihan sebagai kawasan bisnis.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
7	Gerry Alfero Kalampong Alden Laloma Helly Kolondam (2018)(GERRY ALFERO KALAMPUNGALDEN LALOMAHHELLY KOLONDAM, 2020)	Dampak Kebijakan Pembangunan Perumahan (Studi Di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)	Kualitatif	Hasil penelitian adalah Strategi kemajuan penginapan di Ocean Town secara tegas memengaruhi masalah publik dan pada tujuan pengumpulan strategi, yaitu membantu orang-orang yang tidak memiliki rumah untuk mendapatkannya kredit rumah dengan porsi yang wajar, dan di area yang membantu dan aman. Rasa aman dan nyaman masyarakat tidak terpengaruh oleh pembangunan rumah. Dampak utama yang tidak dapat diantisipasi adalah berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengkajian permasalahan yang muncul di lapangan. Karena berupaya memahami realitas kejadian yang diteliti dan mengumpulkan data yang lebih objektif mengenai dampak penerapan kebijakan tilang Elektronik di Kota Batam, maka dipilihlah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata lisan atau tulisan. Pendekatan ini berfokus pada pemikiran, persepsi, pandangan, atau keyakinan subjek yang tidak dapat diukur dengan data atau angka. Prosedur penelitian dimulai dengan pembuatan aturan wawancara, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari informan, analisis, dan penjelasan temuan.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat deskriptif penelitian ini mencoba menggambarkan atau melukiskan keadaan, gejala, dan peristiwa tertentu. Penekanannya adalah pada penelitian fakta-fakta yang ada untuk memberikan solusi tantangan yang nyata dan sistematis. Adapun bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi suatu aspek fenomena sosial tertentu.

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018) ada dua kategori sumber data yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Masyarakat dan pelaksana kebijakan ETLE menjadi informan utama dalam wawancara yang menghasilkan data primer penelitian. Tanpa menggunakan pihak ketiga atau perantara, data dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian dan mencakup berbagai informasi dan pernyataan. Peneliti menggunakan strategi sampel purposive untuk memilih informan, berdasarkan pilihan mereka pada sejumlah faktor. Peneliti berdasarkan keputusan mereka pada kriteria berikut:

- a. Informan yang memahami dan mengerti terhadap penelitian yang dilakukan peneliti.
- b. Terlibat langsung dalam pelayanan ETLE.
- c. Petugas pelaksana kebijakan ETLE di Polda Kepri.
- d. Bersedia untuk bersikap objektif dan transparan dalam memberikan informasi selama proses wawancara dilaksanakan.
- e. Memiliki waktu yang cukup agar dapat terlibat dalam proses wawancara tanpa mengganggu pekerjaan dan kesibukan informan.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan diatas, maka peneliti memilih informan yang dijadikan sebagai narasumber sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Pekerjaan/ Jabatan Informan	Instansi
1	Perwira Kartijo, S.H., M.H.	Kepala Front Office	Polda Kepri
2	Muhammad Verry Zaky	BA SubditGakkum	Polda Kepri
3	Dedy Anry Samosir	BA SubditGakkum	Polda Kepri
4	Roselina	Karyawan Swasta	Masyarakat
5	Henra	Wirausaha	Masyarakat
6	Putra	Karyawan Swasta	Masyarakat

(Sumber: Peneliti, 2023)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data atau informasi tidak langsung yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber data sekunder, termasuk situs web, penelitian sebelumnya, jurnal, buku, dan makalah. Situs website resmi Polda Kepri, yang memberikan rincian tentang pengoperasian ETLE, Dokumen SOP Kebijakan ETLE, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, dan sumber berita online TribunBatam, adalah beberapa sumber data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk menemukan fakta dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Kegiatan pengumpulan data ini sangat penting karena mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya untuk menyediakan data

yang andal, akurat, dan dapat dipertahankan serta dapat mendukung temuan studi yang diantisipasi. Sangat penting untuk mengembangkan alat pengumpulan data yang sesuai dan sejalan dengan prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk tujuan ini. Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk yang tercantum di bawah ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi langsung dengan informan diperlukan selama wawancara, yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun dengan cermat oleh peneliti. Melakukan wawancara dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan memvalidasi data yang telah dikumpulkan. Beberapa informan diwawancarai oleh peneliti, melakukan wawancara kepada Bapak Perwira Kartijo, S.H., M.H. selaku kepala bidang unit Front Office di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Muhammad Verry Zaky selaku BA SubditGakkum Back Office, Dedy Anry Samosir selaku BA SubditGakkum Front Office serta tiga orang masyarakat yaitu Roselina, Hendra dan Putra mereka adalah yang pernah terkena surat konfirmasi pelanggaran tilang elektronik dan pengguna kendaraan bermotor.

2. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk secara sistematis mengamati dan mendokumentasikan setiap gejala atau fenomena yang muncul pada objek penelitian. Agar peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, observasi ini berfungsi untuk mendukung data hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dan informasi dari buku, arsip, catatan, angka, dan gambar yang berisi laporan dan informasi untuk membantu studi. Mempelajari jurnal, sumber berita online, website resmi Polda Kepri, SOP Polda Kepri, dan media lain yang berkaitan dengan subjek penelitian dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Untuk membantu penelitian, informasi yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi selanjutnya akan diperiksa dan dianalisis.

3.6 Metode Analisis Data

Hasil investigasi akan terungkap pada tahap analisis data yang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Mengklasifikasikan, mengevaluasi, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari semua data yang dikumpulkan adalah bagian dari proses analisis data. Oleh karena itu perlu menggunakan dasar pemikiran untuk menentukan pilihan-pilihan teknik analisis data yang akan digunakan.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, peneliti mengungkapkan dan mengeksplorasi kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, penelitian lapangan, dan buku-buku ilmiah yang relevan dengan Dampak Penerapan Kebijakan E-Tilang. Selain itu, data yang diperoleh dari wawancara dengan informan juga dianalisis secara kualitatif untuk mencari pemahaman mendalam dan memperoleh

pemecahan masalah, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang lebih mendalam.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *Interactive Model* yakni dengan tahapan meliputi:

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Merupakan proses pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Merupakan metode analisis data dengan tujuan untuk berfokus pada aspek yang paling penting. Proses reduksi data memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

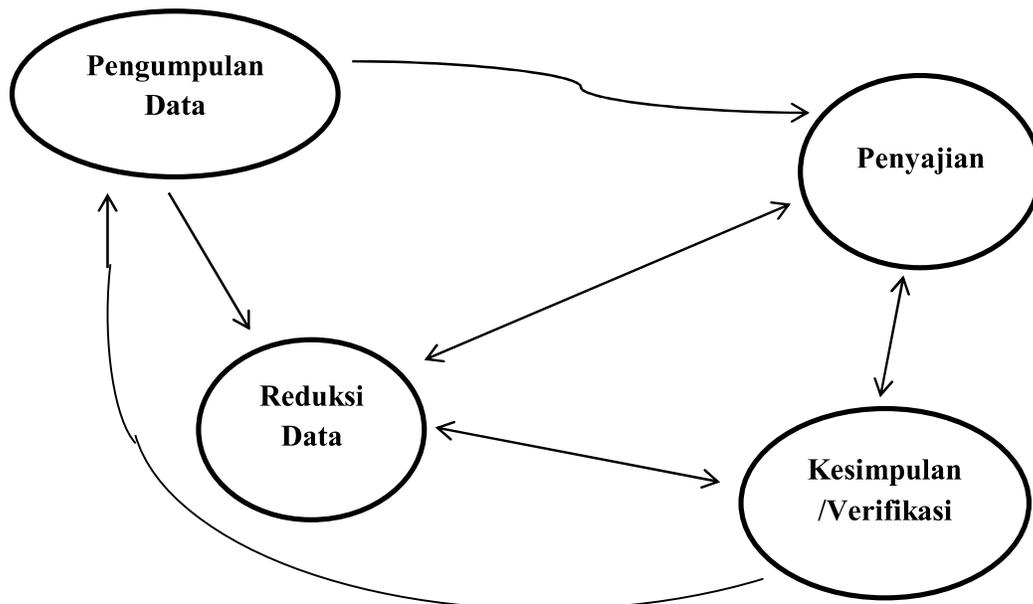
3. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, data mengalami proses reduksi sebelum diberikan deskripsi.

4. *Conclusion Drawing/ Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Prosedur analisis menyeluruh, yang merupakan langkah terakhir dalam proyek penelitian, digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari temuan penelitian.

Komponen-komponen analisis data tersebut diatas oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) disebut sebagai "*model interaktif*" yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Komponen dalam Analisis Data (*interactive model*)

3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2012) meliputi uji validitas internal (*credibility*), validasi eksternal (*transferability*), reabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*) yaitu:

1. Uji *kredibilitas*, perpanjangan observasi peningkatan keuletan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan analisis kasus negatif, dan member check adalah beberapa teknik yang digunakan untuk menilai reliabilitas data.
2. Pengujian *transferability*, dilakukan dengan memaparkan temuan penelitian secara panjang lebar, jelas, metadis, dan reliabel. Diharapkan pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang temuan

penelitian sehingga mereka dapat mengevaluasi apakah dapat digunakan di tempat lain atau tidak.

3. Pengujian *dependability*, proses penelitian lengkap diaudit untuk melakukan uji ketergantungan. Auditor independen atau penyelia dapat melakukan audit untuk memeriksa semua aktivitas terkait penelitian peneliti.
4. Pengujian *confirmability*, melibatkan evaluasi temuan penelitian sehubungan dengan prosedur yang telah digunakan. Penelitian memenuhi persyaratan konfirmasi jika temuan adalah hasil dari metodologi penelitian yang sesuai.

